

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Alenia ke- empat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Term “memajukan kesejahteraan umum” dapat dipahami sebagai sebuah kewajiban besar bagi negara dalam rangka menciptakan suatu suasana kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh warga negaranya.

*Goals* dari agenda tersebut adalah kondisi terciptanya ketercukupan sandang, pangan, papan serta kebutuhan penunjang yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi seluruh warga negara dalam sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur negara atau dalam hal ini pemerintah berkewajiban melaksanakan pembangunan di segala bidang serta aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur berupa jalan raya, pasar tradisional, rumah sakit, embung atau waduk dan lain sebagainya.

Program pembangunan sarana prasarana untuk kepentingan umum dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah dengan sistem pendanaan yang dihasilkan dari beberapa sumber antara lain Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Kabupaten/ Kota. Dana tersebut akan dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan di segala bidang dengan sistem skala prioritas sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik yang disusun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Indonesia yang hingga sekarang masih dikenal sebagai negara agraris memandang bahwa sektor pertanian merupakan target yang harus betul – betul diupayakan pengembangannya. Hal tersebut dibuktikan dengan suatu kondisi bahwa peruntukan bidang tanah sebagai area pertanian baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa cukup dominan jika dibandingkan dengan peruntukan yang lainnya misalnya permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, pertambangan, industri dan lain sebagainya. Dalam hal pengembangan pada sektor pertanian, pemerintah melaksanakan berbagai terobosan mulai dari sistem intensifikasi atas berbagai jenis tanaman pangan, pencukupan kebutuhan pupuk, pelaksanaan pelatihan cara bertani serta bercocok tanam yang benar hingga upaya pemenuhan kebutuhan air guna

sistem irigasi yang efektif berupa pembangunan bendungan atau waduk di berbagai daerah di Indonesia.

Program pemerintah pusat di Kabupaten Kudus dalam sektor pertanian adalah pelaksanaan pembangunan Waduk Logung yang berlokasi di 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe dan di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Jekulo. Program pembangunan tersebut secara mayoritas didanai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai penyedia dana pendamping. Prinsip serta tujuan umum dari pembangunan Waduk Logung sangat berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.

Hak menguasai oleh negara tersebut memberikan kewenangan kepada negara antara lain untuk mengatur serta menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Waduk Logung di Kabupaten Kudus akan berlaku sebagaimana Waduk Kedung Ombo di wilayah Kabupaten Boyolali yang pada prakteknya mampu mengairi tanah pertanian di beberapa wilayah di sekitar Kabupaten Boyolali seperti Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak hingga wilayah pertanian di Kabupaten Kudus khususnya wilayah sisi bagian selatan. Namun demikian dalam tujuan yang khusus, keberadaan Waduk Logung di

Kabupaten Kudus secara otomatis akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi sektor pertanian karena akan tercipta ketercukupan atas kebutuhan air irigasi untuk peningkatan produksi tanaman pangan bagi para petani, disamping tujuan serta manfaat pada sektor yang lain yang tentunya juga menjadi impian bagi Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu Sektor Pariwisata.

Berkenaan dengan pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus bersangkutan, hingga saat ini masih dipandang terdapat hal yang sangat mendasar dan perlu segera diselesaikan demi tuntasnya program pembangunan yang masuk kategori mega proyek tersebut. Proses pengadaan tanah serta proses pemberian ganti rugi terindikasi sebagai permasalahan utama yang sangat pelik untuk diselesaikan, dimana semua tindakan hukum berkenaan dengan proses pelepasan bidang tanah ataupun proses pemberian ganti rugi atas bidang tanah yang dilepas bersangkutan tentu akan membawa akibat hukum yang cenderung negatif jika penanganannya tidak dilaksanakan secara benar dan hati - hati.

Program pembangunan Waduk Logung itu sendiri dilaksanakan berdasar Surat Keputusan Bupati Kudus No. 031/403.1/ 2013 Tentang Perpanjangan Atas Surat Keputusan Bupati Kudus No. 031/126.1/2012 Tentang Penetapan Lokasi Waduk Logung, yang ditargetkan akan diselesaikan hingga Tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Kudus selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat yang bertugas melaksanakan proses pengadaan lahan untuk lokasi Waduk Logung dalam wujud pelepasan bidang tanah serta pemberian ganti rugi atas pelepasan bidang tanah bersangkutan

setidaknya harus merujuk kepada beberapa peraturan perundang – undangan diantaranya Undang – Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Menyangkut proses pemberian ganti rugi atas lahan bakal bangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus, ternyata masih diwarnai dengan banyaknya permasalahan yang berlanjut dengan kondisi pro kontra di kalangan masyarakat terhadap program pembangunan bersangkutan, sehingga berakibat tertunda atau lambatnya proses pembangunan Waduk Logung itu sendiri, utamanya pada tahapan pelepasan bidang tanah serta pemberian ganti rugi atas bidang tanah. Fakta atas kondisi yang pro dan kontra tersebut dapat terlihat dalam dinamika yang berkembang di kalangan masyarakat baik di Desa Tanjung Rejo maupun Desa Kandangmas, diantaranya meleburnya bagian warga masyarakat di sekitar lokasi pembangunan Waduk Logung dalam satu wadah yang mereka sebut Forum Komunikasi Masyarakat Korban Embung Logung (Forkoma Kembang) yang dikordinatori oleh Hardjono sebagaimana tayangan pemberitaan oleh [tribunjateng.com](http://tribunjateng.com) yang menyebutkan :

Warga Kudus yang terkena dampak pembangunan Waduk Logung menuntut proses pembebasan lahan sementara, sebab belum ada kejelasan mengenai izin lingkungan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tribunjateng.com, Tanggal 18 Januari 2015

Selain itu nuansa keberadaan penolakan juga diungkapkan oleh masing – masing Kepala Desa Kandangmas dan Kepala Desa Tanjung Rejo sebagaimana release yang telah dilansir media yang menyebutkan :

Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengajukan gugatan mengenai ganti rugi. Masyarakat Desa Kandangmas sendiri ada 43 warga yang mengajukan gugatan, sedangkan dari Desa Tanjung Rejo hanya 3 warga yang mengajukan gugatan.<sup>2</sup>

Dari hal tersebut penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian tentang tinjauan secara yuridis atas pemberian ganti rugi dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan Waduk Logung bersangkutan, dengan harapan bahwa hasil dari penelitian nantinya dapat dipergunakan sebagai masukan serta sumbang saran kepada Pemerintah Kabupaten Kudus demi suksesi pembangunan Waduk Logung.

## **B. Perumusan Masalah**

Pembahasan dalam skripsi penulis yang berjudul “PELAKSANAAN GANTI RUGI UNTUK PENGADAAN TANAH DALAM PEMBAGUNAN WADUK LOGUNG DI KABUPATEN KUDUS” akan dibatasi pada permasalahan – permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada warga yang terkena dampak pembangunan waduk dan apa yang menjadi dasar perhitungan yang dipakai dalam pemberian ganti rugi tersebut?

---

<sup>2</sup>Harian Suara Merdeka, Tanggal 14 Pebruari 2015, Hlm. 6

2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi atas pelepasan bidang tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, tujuan umum yang diharapkan dapat tercapai antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada warga yang terkena dampak pembangunan waduk dan apa yang menjadi dasar perhitungan yang dipakai dalam pemberian ganti rugi tersebut ;
2. Untuk mengetahui apa saja upaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi atas pelepasan bidang tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung tersebut ;

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang pelaksanaan ganti rugi untuk pengadaan tanah dalam pembangunan Waduk Logung Di Kabupaten Kudus tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat yang positif bagi Kabupaten Kudus baik secara teoritis maupun praktis.

## **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, utamanya pada disiplin ilmu Hukum Tata Negara (HTN) ;

## **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat secara umum, terutama kepada Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka menetapkan kebijakan serta regulasi tentang pelaksanaan ganti rugi untuk pengadaan tanah dalam pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam bagian ini, penulis menerapkan sistematika atas bagian – bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub bab, yang kesemuanya tentu diupayakan untuk ditata sedemikian rupa agar masing – masing dapat saling berkaitan dan lebih sistematis, terarah, serta mudah dimengerti oleh pembaca, sehingga keberadaanya menjadi saling mendukung dan merupakan satu kesatuan yang utuh.

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, perumusan masalah, tujuan penelitian,



kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi kajian pustaka yang berkaitan langsung dengan judul dan masalah yang diteliti, serta menjelaskan kepustakaan yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang diteliti tersebut, diantaranya yaitu “Pengertian tanah untuk kepentingan umum” sebagai tinjauan pertama, “Pengertian Pengadaan Tanah” sebagai tinjauan kedua, “Pengertian Kepentingan Umum” sebagai tinjauan ketiga, “Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum” sebagai tinjauan keempat, “Panitia Pengadaan Tanah” sebagai tinjauan kelima, dan “Asal Usul Perolehan Bidang Tanah” sebagai tinjauan keenam, “Pelepasan Hak Atas Tanah” sebagai tinjauan ke tujuh, dan Pemberian/ pelaksanaan Ganti Rugi sebagai tinjauan ke delapan.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang penggambaran secara lebih terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang diberlakukan. Tiap metode yang digunakan diberikan uraian mengenai pengertiannya, alasan penggunaannya, serta bagaimana cara mengoperasikanya. Disamping itu juga dilengkapi teori atau pendapat para pakar atau ahli yang

dijadikan dasar masing – masing penggunaan metode dan spesifikasinya. Secara terperinci, isi dari bab ini terdiri dari : Metode Pendekatan, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Pengolahan Data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mencakup hasil penjelasan dari penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan ganti rugi untuk pengadaan tanah dalam pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus, berikut apa saja upaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi atas pelepasan bidang tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung tersebut.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam bab yang terakhir ini berisi tentang uraian kesimpulan dari hasil pembahasan serta memuat saran – saran mengenai permasalahan yang ada untuk ditujukan kepada pihak – pihak yang berkepentingan berkenaan dengan permasalahan yang dijadikan obyek penelitian.